

MENDOBRAK PAHAM MULTIKULTURALISME

Oleh: D. Tiala

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah multikulturalisme menggema di Indonesia. Istilah ini semakin populer dan menjadi buah tutur di kalangan yang berbeda-beda. Berbagai diskusi, seminar sering digelar di beberapa kota besar di Jawa. Gaung pemakaian istilah ini tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme sering disamakan begitu saja dengan pluralisme. Pemaparan Robert W. Hefner mengenai multikulturalisme di Malaysia, Singapura dan Indonesia mengikis penyamarataan makna multikulturalisme dan pluralisme. Ruang pemaknaan pembaca harus didobrak dengan mengutak-atik simpul-simpul paham multikulturalisme yang sedang menjadi menu pembicaraan yang hangat terutama di kalangan akademisi.

Sajian multikulturalisme di tiga negara Asia Tenggara ini diawali Robert W. Hefner dengan membuka bungkusan fakta historis. Abad ke-19 digambarkan sebagai abad yang ditandai dengan ketidaksiapan orang-orang liberal menghadapi kemajemukan budaya. Pasca perang dunia pertama, para pemikir barat masih meyakini demokrasi sebagai pilar peyangga masyarakat multikultural. Namun problem rasial dan etnis warisan perang dunia kedua memicu kekecewaan sehubungan dengan pengakuan identitas-identitas komunal. Hak-hak individu dipandang sebagai masalah pokok dalam proses demokratisasi yang harus menjadi orientasi. Walaupun hak individu dilindungi tetapi hak lebih lanjut tidak dijamin perlindungannya terutama bagi minoritas nasional atau etnis tertantu. Pengesahan “teori modernisasi” pasca perang dunia kedua dengan premis kuncinya “demokrasi mustahil tanpa modernisasi dan modernisasi menuntut homogenisasi kebudayaan politis” menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan itu mencuat ke permukaan sejalan dengan berkembangnya gagasan bahwa integritas nasional, demokrasi dan perdamaian sipil harus ditegakkan dengan mengorbankan solidaritas-solidaritas

etnoreligius. Selain itu, masalah pluralisme budaya menjadi kabur dan hanya disebut-sebut dalam kaitannya sebagai penghalang kemajuan demokrasi.

Demokrasi yang diagungkan sebagai idealisme politisi barat dekade 1950-an dan 1960-an perlahan-lahan tergoncang seiring dengan keruntuhan komunisme Eropa Timur sejak awal 1990-an termasuk negara-negara bekas komunis di kawasan Balkan dan Kaukasia yang berciri plural. Tetapi keruntuhan negara-negara tersebut tidak diikuti dengan perdamaian yang demokratis. Masalah besar yang terjadi saat itu adalah konfrontasi etnoreligius untuk merebut kontrol atas negara. Fakta yang tak dapat dihindari adalah para pembuat kebijakan dan penyusun teori harus bisa mengatasi masalah pluralisme dan demokrasi.

Problem pluralisme kembali diperdebatkan pada dekade 1990-an dan 2000-an searah dengan meningkatnya arus imigrasi. Imigrasi berkembang bersamaan dengan kebangkitan kembali etnis masyarakat industrial maju dan kokohnya etnoreligius di berbagai belahan dunia yang sedang berkembang. Model "*Anglo-American*" atau "*Anglo conformist*" yang menjadi kebijakan di Amerika Serikat, Kanada dan Australia ternyata mendepak penduduk pribumi dari tanah kelahiran mereka dan memberi tempat pada masyarakat pemukim. Namun di tahun 1980-an dan 1990-an terjadi perubahan mendasar kebijakan Anglo-American. Minoritas berani menegaskan kembali identitas mereka. Di Eropa Barat keberanian minoritas membuat berang kaum ekstrim kanan dan memaksa mainstream untuk membenahi kolaborasi warga negara antara kubu-kubu kultural yang berbeda.

Belakangan ini masalah pluralisme dan demokrasi kembali memicu perdebatan dalam kemasan *multicultural citizenship*. Di era globalisasi ini tantangan pluralis tidak hanya melanda masyarakat Barat melainkan juga masyarakat non Barat. Masalah pluralisme dan demokrasi harus ditempatkan pada posisi pengukuran kepatuhan masyarakat pada cita-cita liberal bukan pada pemahaman kondisi kultural dan sosiologis. Tentu saja kondisi ini menimbulkan respon yang berbeda-beda terhadap persoalan pluralisme dan kewarganegaraan.

Pada masyarakat non Barat hanya sedikit daerah yang mengalami tantangan pluralisme budaya. J.S.Furnival seorang penulis politik Inggris mengidentifikasi tiga

negara di kawasan Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai contoh negara-negara yang mengalami tantangan pluralisme budaya. Walaupun warga masyarakat di ketiga negara itu hidup berdampingan tetapi mereka tidak membaaur dalam satu unit politik. Terbentuknya segregasi sosial semakin mengkodisikan tidak adanya kehendak sosial umum di antara warga masyarakat. Seksi-seksi etnis dan religius secara keseluruhan membentangi jarak pada masyarakat sehingga mereka tidak memiliki banyak kesamaan selain pertukaran pasar. Situasi dan kondisi ini diciptakan kaum kolonial yang oleh Furnivall diharapkan segera berlalu. Harapan Furnivall harus ditindaklanjuti dengan upaya merenungkan sejarah kultural dan politis yang membuat kawasan Asia Tenggara terutama tiga negara yang disebutkan mengalami problem pluralitas seperti yang terjadi saat ini.

Indonesia, Malaysia dan Singapura telah banyak menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan, organisasi-organisasi sipil dan dialog publik sejak awal kemerdekaan. Masyarakat sipil dan lingkup publik di ketiga negara tersebut telah mengalami pendewasaan yang lebih besar dari pada negaranya. Di Singapura warga masyarakatnya telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun kesabaran dan sikap moderat mereka telah diabaikan oleh pemerintah. Kebanyakan orang Singapura merasa nilai-nilai yang diklaim pemerintah sebagai nilai yang diperlukan bagi masa depan Singapura terlalu berat sebelah dan tidak memberi ruang pada kompleksitas masyarakat atau sofistikasi warga negaranya. Walaupun nilai-nilai bersama sering diabaikan pemerintah, namun Singapura pantas dilirik sebagai kandidat yang baik bagi evolusi yang mantap tetapi lamban dari statisme konservatif ke negara dan masyarakat yang lebih sipil.

Malaysia di tahun-tahun belakangan ini telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam hubungannya dengan etnoreligius. Meskipun pencapaian mereka tercerai berai dalam hal keadilan, kesetaraan dan transparansi, kebijaksanaan-kebijaksanaan negara telah berhasil mendongkrak pendapatan dan kepercayaan diri penduduk Melayu yang pada gilirannya mampu mengurangi pengaruh ekonomis pada ketegangan etnoreligius. Namun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Malaysia di bidang pendidikan, infrastruktur dan penghapusan kemiskinan semestinya diikuti dengan

pertumbuhan masyarakat dewasa yang membutuhkan politik sipil untuk mengonsolidasi kemajuan sosial dan ekonominya. Pengadilan terhadap Anwar Ibrahim dan pembangkan pro demokrasi mengindikasikan suatu kemunduran serius. Contoh ini memberi kesan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai masyarakat semestinya diimbangi keadaban (*civilized*) negaranya sendiri.

Indonesia pun mengalami problem yang sama. Di satu sisi, Indonesia pantas dipuji karena telah menciptakan gerakan Islam demokratis di dunia. Namun di sisi lain, Indonesia sudah dipengaruhi praktek politik elite yang menodai cita-cita politiknya. Terpaan krisis yang begitu dasyat semakin mengaburkan bahkan menenggelamkan kemajuan yang dicapai tahun demi tahun dan dasar-dasar kebangsaan kembali dipersoalkan.

Gambar makro kondisi ketiga negara yang dilanda masalah pluralitas memperlihatkan kondisi ambang batas dalam sejarah modern mereka. Kemajuan-kemajuan yang dikondisikan oleh interaksi pluralis dalam pendidikan, pasar dan budaya publik sangat mengesankan. Tetapi sejarah ketiga negara tersebut membuktikan, bahwa pilar-pilar penyangga masyarakat modern tidak selalu berkembang secara bersamaan. Hal yang sepatutnya diwaspadai adalah kepentingan-kepentingan elite yang dominan melebihi klaim pasar dan demokrasi. Selain itu bahaya diskriminatif akan selalu menjadi baying-bayang yang menakutkan jika tidak dikelola dengan baik.